



**PEMERINTAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**



**DINAS PEMBERDAYAAN  
PERMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

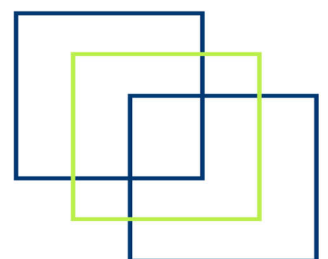
# **LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025**



Jl. Jend. Sudirman, Tungkal IV Desa, Kec. Tungkal  
Iilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi  
36514



<https://p3ap2kb.tanjabbarkab.go.id/>



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran pada Dinas P3AP2KB dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja ini secara umum menggambarkan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang ditetapkan selama periode satu tahun anggaran. Pada tahun 2025 capaian sasaran dan IKU telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, kami menyadari masih banyak ruang untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu kinerja organisasi. Saya mengapresiasi seluruh kerja keras dan upaya yang sudah dilakukan jajaran keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan seluruh stakeholder terkait serta mitra kerja yang telah bekerja sama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang bermanfaat kepada seluruh masyarakat atas kinerja yang dihasilkan dan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan Rencana kerja pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB di tahun mendatang.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



**AINA DEWIANA**

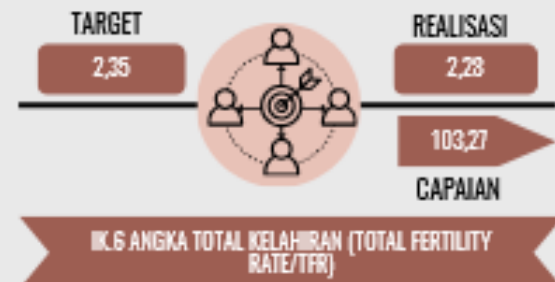
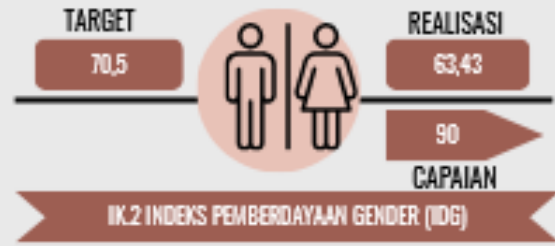
Pembina

NIP. 19721030 199203 2 004

# SUMMARY REPORT

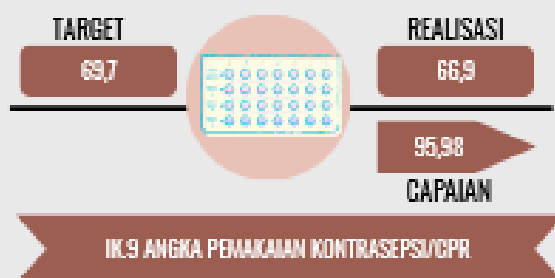
## CAPAIAN KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

### SS.1.3 MENINGKATNYA KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN KELUARGA

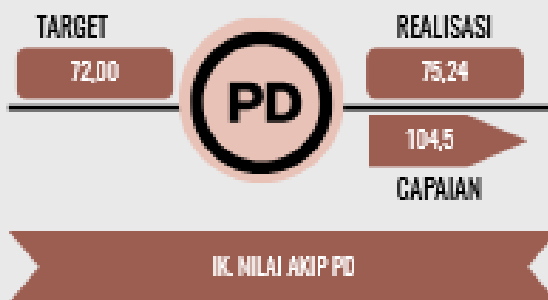


**CAPAIAN KINERJA UTAMA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN**  
**KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025**

**SS.1.3 MENINGKATNYA KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN KELUARGA**



**SS2 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan di Tanjung Jabung Barat antara lain pemberdayaan perempuan dalam segala bidang pembangunan, implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak secara komprehensif dan lintas sektor, Pembangunan kualitas dan pengendalian penduduk serta Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga yang sinergis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB disusun selaras dengan RPJMD 2025-2029, dengan fokus pada empat tema, yakni: 1) Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan, yang menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan; dan 2) Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; 3) Pengendalian Penduduk merupakan faktor penting untuk menciptakan pertumbuhan populasi yang seimbang, 4) Pelayanan Keluarga Berencana (KB), dan keluarga sejahtera merupakan salah satu strategi untuk menekan pertumbuhan penduduk dan membangun keluarga berkualitas serta menurunkan angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam melaksanakan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah menetapkan Tujuan 1) Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, status kabupaten layak anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi; dan 2) Terwujudnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang berkinerja tinggi dan akuntabilitas. Dan Menetapkan 5 sasaran strategis yaitu; 1). Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 2) Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan; 3) Meningkatnya Kualitas Keluarga; 3) Meningkatnya perlindungan terhadap anak; 4) Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk; 4) Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi (KBKR); 5) Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS), Selain menjalankan tugas dan fungsi utamanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB juga melaksanakan 5 arahan Presiden, yaitu 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) Penurunan pekerja anak ; 5) Pencegahan perkawinan anak.

Dalam mencapai kinerja diperlukan Strategi komprehensif yang dirancang untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Renstra. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan menjadi prioritas utama melalui penguatan kebijakan responsif gender, perubahan pola pikir masyarakat, dan program pemberdayaan. Di sisi lain, akses pelayanan anak akan ditingkatkan melalui kebijakan yang berpihak pada anak, penguatan sistem pemenuhan hak anak, edukasi, dan pencegahan perkawinan anak. Sinergi dengan lembaga masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga juga menjadi strategi utama.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah melakukan pendekatan pentahelix melalui sinergi, kolaborasi, dan penguatan lembaga lembaga masyarakat peduli perempuan dan anak untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan akan Pditingkatkan melalui sistem layanan komprehensif, standardisasi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Edukasi, pencegahan kekerasan, dan penguatan sistem data juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya ini. Terakhir, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi landasan kuat bagi seluruh upaya tersebut. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, akuntabilitas, serta pengembangan SDM akan memastikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB siap menjawab panggilan tugas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, setara, dan melindungi bagi semua.

### **1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029 telah ditetapkan 5 tujuan pembangunan. Salah satu tujuan yang ditetapkan adalah “Meningkatkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, dan inovatif dan memiliki daya tahan sosial” dan 17 sasaran, salah satunya adalah Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan hak anak. Bupati memberikan tugas kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kualitas Hidup perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan Perempuan dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak

anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

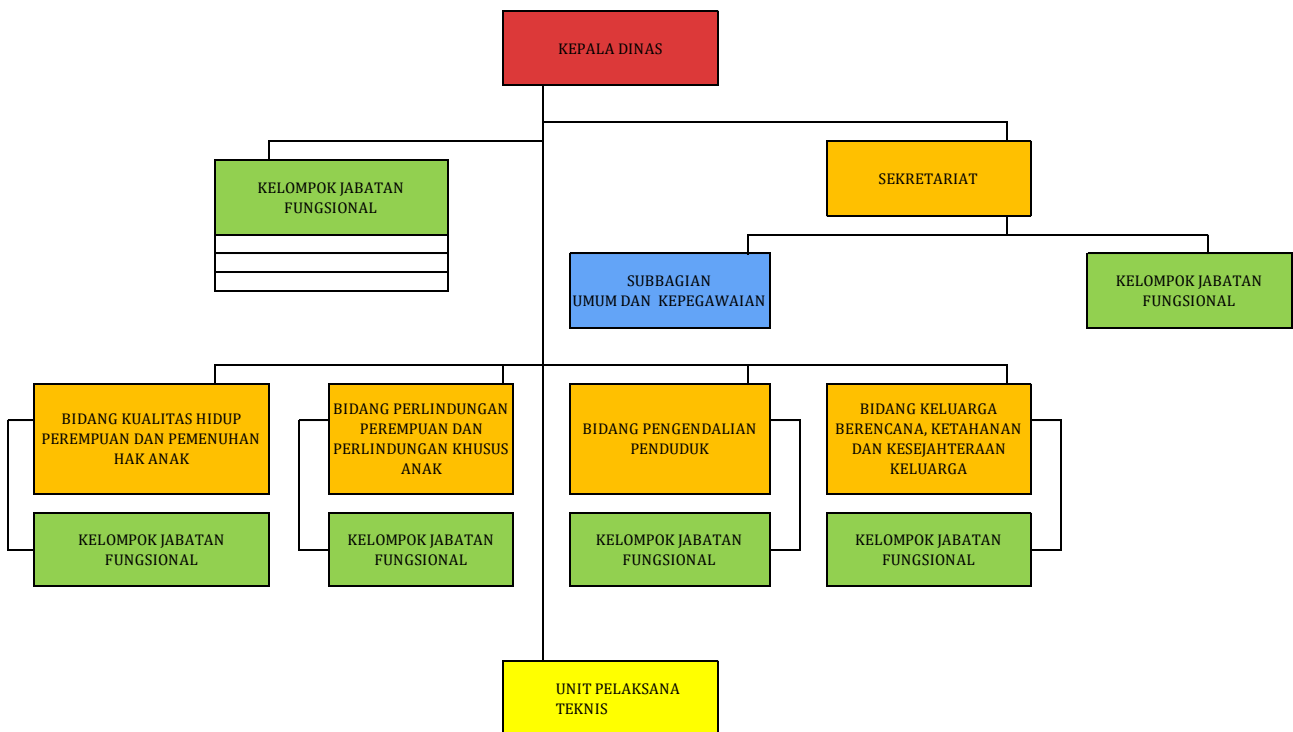
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2022/2025 tentang perubahan atas Perbup Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan di bantu oleh 1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang dan 1 UPT PPA. Adapun struktur organisasi DP3AP2KB dapat dilihat pada gambar 1.1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



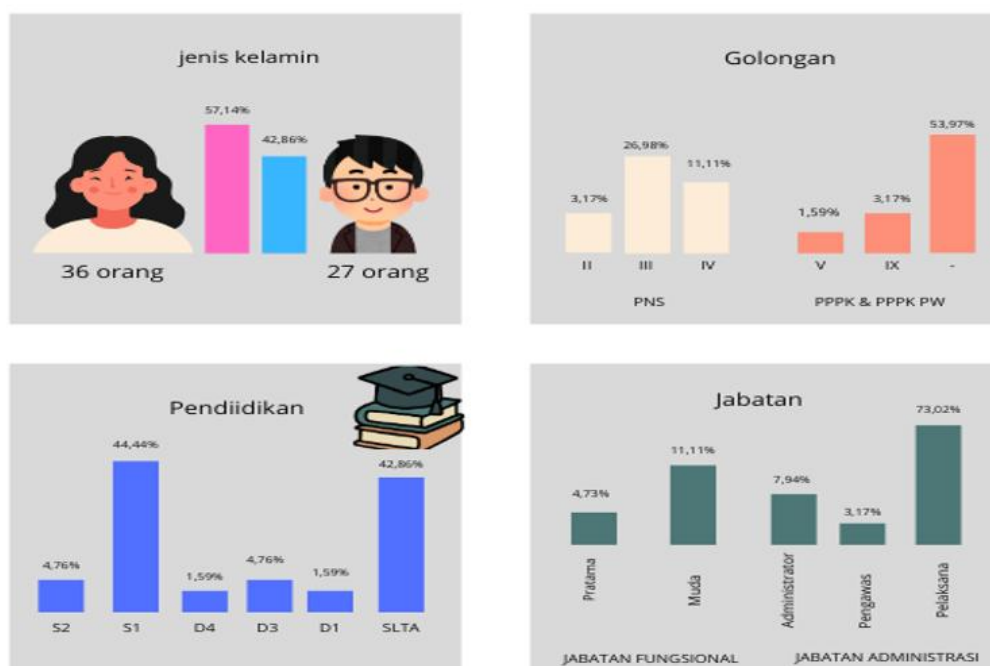
*Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB*

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 63 pegawai yang terdiri dari 26 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), 3 staf PPPK, dan 34 pegawai P3K Paruh Waktu. Sebanyak 36 pegawai berjenis kelamin perempuan (70%) dan 27 laki-laki (30%). Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, sebanyak 44,44% adalah lulusan S1, 4,76% lulusan S2, 4,76% lulusan D3, dan lainnya lulusan D1, dan SMA/SMK.

Dari 63 pegawai ASN, sebanyak 61% merupakan golongan III, 24% golongan IV, dan 15% golongan II. Sementara itu, dari 126 staf PPPK sebanyak 87% merupakan golongan IX dan 6% golongan VII. Jabatan ASN di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB terdiri dari 5 Pejabat Administrator (JPT), Jabatan Fungsional (JF) Keahlian, dan JF Administrasi. Dari 28 pegawai yang menduduki JPT, sebanyak 79% merupakan JPT Pratama dan sisanya JPT Madya (21%). Sementara, dari 301 pegawai JF Keahlian, tersebar menjadi 26% JF keahlian muda, 58% JF Keahlian pertama, dan 16% JF Keahlian Madya. Sementara itu, sebanyak 38 pegawai merupakan JF Keterampilan. Sebanyak 106 pegawai memiliki Jabatan Administrasi (JA), dan 92,5% merupakan Jabatan Administrasi Pelaksana (Gambar 1.2).

Gambar 1.2 SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan

### Jumlah Pegawai DP3AP2KB Kab Tanjung Jabung Barat



Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB per Desember 2025

## 1.2. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan khususnya sasaran pembangunan tahun 2025 yaitu 1) Meningkatnya Akses dan kualitas layanan kesehatan 2) Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Keterkaitan tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditunjukkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dalam Perbup nomor 5 Tahun 2025 tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB bertanggungjawab untuk berkontribusi secara langsung terhadap Sasaran Pembangunan pada RPJMD 2025-2029, yaitu untuk Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemenuhan hak anak. Adapun rincian dukungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB pada setiap Program Nasional, melalui pelaksanaan Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang tertuang dalam RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1 Mandat Program Nasional, Program Prioritas RPJMD dan Peran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB diKabupaten Tanjung Jabung Barat

Program Nasional (PN)	Program Prioritas (PP) Kementrian	Program Prioritas RPJMD	Kegiatan Prioritas (KP)
04. Memperkuat Pembangunan SDM,sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender,Serta penguatan Peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program Perlindungan Khusus Anak</li> </ul>	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan dari kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>➤ Program Perlindungan Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan,</li> <li>➤ Perlindungan Perempuan</li> </ul>
	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program Keluarga Berencana</li> <li>➤ Program Keluarga Sejahtera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penurunan Kematian Ibu dan Anak</li> <li>➤ Pencegahan dan Penurunan stunting</li> <li>➤ Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan Kespro</li> </ul>
	Peningkatan Ketangguhan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program Keluarga Sejahtera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penguatan Institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai,moral,integritas karakter, dan pengembangan psikologis anak</li> <li>➤ Penyediaan Fasilitas Pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga</li> <li>➤ Pemenuhan hak sipil dan hukum serta afirmasi bagi keluarga rentan</li> </ul>

06.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	➤ Program Pengendalian Penduduk	➤ Pengembangan Ekonomi Perawatan
	Peningkatan kemandirian Pedesaan yang berkelanjutan	➤ Program Pengendalian Penduduk	➤ Tata kelola pendampingan / penyuluhan

### 1.3. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 1.3.1. Isu Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Utamanya di sektor pendidikan, Ekonomi, Politik, dan Sosial

Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Kesetaraan gender merupakan salah satu isu global. Oleh karenanya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs).



Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia, bukan hanya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

Kesetaraan gender di Indonesia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam

tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM laki laki dan IPM perempuan. Berdasarkan data BPS Tahun 2024 untuk Propinsi Jambi, IPM perempuan sebesar 69,56 dan laki-laki sebesar 77,72. Artinya terdapat ketimpangan sebesar 8,16 poin antara IPM laki-laki dan perempuan. Capaian IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 adalah sebesar 86,53, yang berarti pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan, yang berarti pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Secara Nasional data IPG Indonesia adalah 91,85 %, untuk IPG Propinsi Jambi 89,50

Pencapaian IPG antar kabupaten/kota di Propinsi Jambi juga terlihat masih terdapat ketimpangan. Berdasarkan data BPS, IPG tahun 2025 dilihat dari disparitas antar Kabupaten di Propinsi Jambi, terdapat ketimpangan capaian IPG sebesar 12,23 poin antara Kabupaten IPG tertinggi Kota Sungai Penuh (IPG 94,70) dan Kabupaten IPG terendah adalah Muaro Jambi (IPG. 82,47)

Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan dan politik. Capaian IDG di Indonesia pada tahun 2025 adalah sebesar 77,62. Angka tersebut didapatkan dari tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Pada Tahun 2025 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Propinsi Jambi adalah 64,85, Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 63,43.

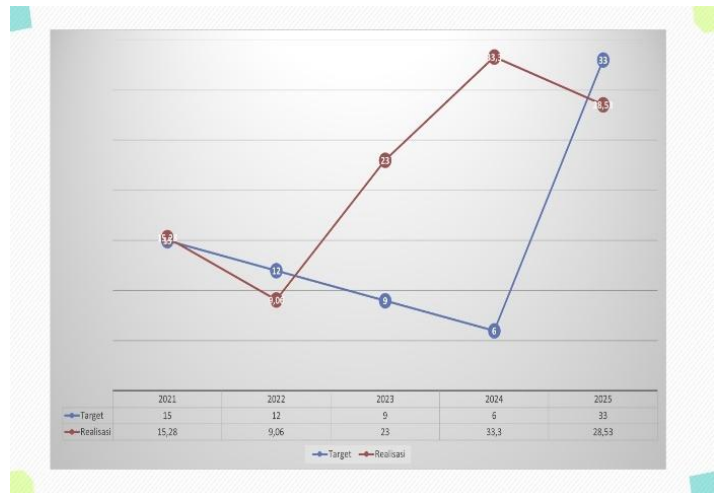
### **1.3.2. Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**

Data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hasil pelayanan yang dilakukan di UPT PPPA Kab.Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 dalam setahun terakhir 60 kasus kekerasan dengan jumlah korban 47 orang, sebanyak 8% perempuan Anak sampai dewasa usia 6-51 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami kekerasan daripada di perdesaan. Data ini menunjukkan bahwa sebanyak 8 dari 100.000 penduduk perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual setidaknya satu kali dalam setahun terakhir ini.

Data Kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya penurunan angka prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan berusia 6 sampai 51 tahun oleh pasangan dan selain pasangan dalam kurun waktu setahun terakhir dari 33,3 (2024) menjadi 28,53 (2025). Dengan kata lain menurun sebesar 4,47% dalam kurun waktu 1 tahun.

Berdasarkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan terdata pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), dalam lima tahun terakhir (2021-2025) rasio kekerasan pada perempuan fluktuatif / naik turun dari

15,28% pada 2021 meningkat menjadi 28,53 (2025). Rasio kekerasan pada tahun 2025 (28.3%) lebih rendah dari tahun 2025 (33,3%) . Begitupula dengan jumlah korban kekerasan menurun dari 65 orang (tahun 2024) menjadi 63 orang (Tahun 2025).



Berdasarkan pengaduan yang diterima melalui Simfoni PPA maupun pelayanan langsung pada Unit Pelaksana Tekhnis Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2025 kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi pada usia 13-17 tahun (18 korban) dan 6-12 tahun (16 korban) dengan Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan, pada tahun 2025 ada 22 laporan KDRT. Kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi terutama KDRT selalu menempati angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama 3 tahun terakhir. Sementara itu, jenis layanan yang paling banyak diterima korban adalah pengaduan, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. jenis layanan yang paling banyak diterima korban adalah pengaduan, layanan kesehatan, pendampingan psikolog dan bantuan hukum.

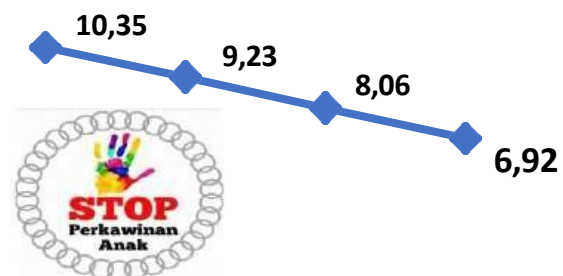
Data Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 7 anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya.

Selain itu, data pada Simfoni PPA wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2025, korban KtA yang paling banyak adalah anak perempuan sebanyak 32 orang. Jenis kekerasan yang yang banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, psikis, dan fisik. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2023-2025. Sementara itu, pelaku yang sering melakukan kekerasan adalah pacar/teman, orang tua, lainnya, dan tetangga. Berdasarkan tempat kejadiannya, KtA paling banyak terjadi di rumah tangga. Selain itu, tempat lainnya, fasilitas umum, dan sekolah juga sering menjadi tempat KtA. Terdapat empat jenis layanan yang paling banyak diterima anak korban kekerasan yaitu pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan penegakkan hukum. Selain itu, layanan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pendampingan tokoh agama, dan pemulangan juga diterima korban KtA. Layanan yang diberikan kepada anak korban kekerasan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban

### 1.3.3. Isu Perkawinan Anak

Tren persentase perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun dari tahun 2021 hingga 2024 terjadi penurunan, dan kembali meningkat pada tahun 2025 Meskipun persentasenya turun, laju penurunannya secara rata-rata hanya berkisar 5% sehingga tetap perlu upaya pencegahan perkawinan anak dengan mengendalikan terjadinya permohonan

dispensasi perkawinan. Hingga saat ini



pemerintah masih mendeteksi adanya perkawinan anak yang diajukan dan dikabulkan dikarenakan anak mengalami kehamilan. Padahal, kehamilan usia anak dapat meningkatkan risiko anak lahir stunting, masalah kesehatan lainnya, hingga kematian.

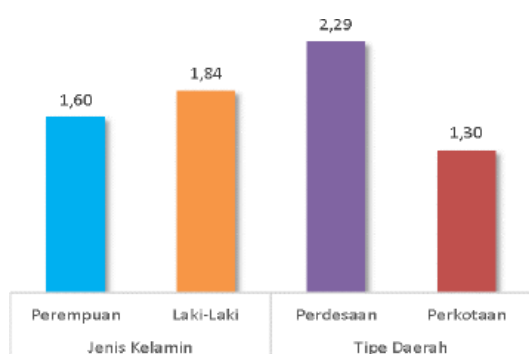
**2020      2021      2022      2023**

Gambar 1.4 Tren yang Menikah Sebelum Berumur 18 tahun 2021-2025 Sumber: Kemenag Tanjab Barat 2021-2025

Pernikahan usia anak banyak memiliki dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan dari sisi kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan yang mempunyai resiko tinggi untuk meninggal sedangkan anak yang dilahirkan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk memiliki berat badan lahir rendah. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan menyebabkan anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masuk kedalam dunia kerja formal. Anak yang memiliki tingkat partisipasi sekolah yang rendah atau putus sekolah lebih rentan mengalami perkawinan dibawah 15 tahun atau 18 tahun dan begitupun sebaliknya.

#### 1.3.4. Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49Th) Masih Relative Tinggi

Pada aspek kependudukan hal paling mendasar dalam pembangunan apabila di lihat dari nilai universal, dimana penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Peran penduduk tersebut, kualitas penduduk perlu ditingkatkan melalui berbagai sumberdaya yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk meningkatkan kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan tempat). Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat fertilitas, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi, sehingga pengukuran terhadap fertilitas ini dilakukan melalui dua macam pendekatan yaitu Yearly Performance dan Reproductive History, salah satu teknik yang termasuk dalam pendekatan Yearly Performance adalah Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total. TFR adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya. Dengan keberhasilan dan konsistensi pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia selama kurang lebih 4-5 dekade, TFR di Indonesia berhasil mengalami penurunan yang sangat nyata dari 5,6 anak per perempuan pada tahun 1971 menjadi 2,14 anak per perempuan tahun 2022.



Gambar 1.5 TFR Tahun 2021-2025

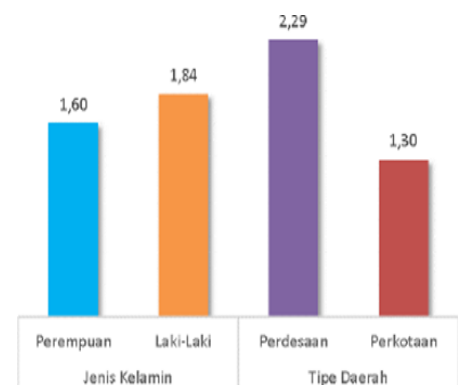
Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat TFR ditargetkan pada tahun 2021 sampai dengan 2025 sebesar 2.54 kelahiran per wanita usia subur dan menjadi 2.39 pada tahun 2024 (*Sumber data BPS/SP 2020*). Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini terkait dengan pengendalian jumlah penduduk khususnya pengendalian kelahiran menuju target ideal 2,1 anak per wanita yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2026

#### 1.3.5. Kebutuhan Ber-KB yang Belum Terlayani

Menurut Bradley et al (2012), Unmet NeedKB didefinisikan sebagai persentase perempuan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi, tetapi tidak menginginkan anak lagi atau menjarangkan kehamilan. Makna harfiah atau makna literal dari kata unmet need adalah kebutuhanber-KB yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan keinginan Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Kemungkinan yang lain adalah penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS saat ini pun tidak sesuai dengan keinginannya (Listyaningsih, et al, 2016).

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unmet need persentase kebutuhan ber-Kb yang tidak terpenuhi adalah persentase wanita kawin/Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Berdasarkan karakteristik dan hasil penelitian serta latar belakang bahwa 25,7 persen unmet need terjadi pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang berumur 45-49 tahun.Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar unmet need terjadi pada perempuan yang tingka tkesuburannya sudah berkurang. Sebanyak 22,7 persen diantaranya bahkan Tidak Ingin Anak lagi (TIAL). Unmet need yang tinggi juga terdapat pada PUS dengan jumlah anak 4 (empat) atau lebih (26,5 persen). Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ini dapat diarahkan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) agar tidak menyebabkan drop out (DO) yang berkontribusi pada angka unmet need.

Berdasarkan tingkat pendidikan, unmet need paling banyak terjadi pada tingkat pendidikan terendah(tidaktamat SD) sebanyak 26,1 persen. Kelompok tertinggi selanjutnya justru terjadi pada tingkat pendidikan tertinggi (Perguruan Tinggi) sebanyak 18,9 persen. Dengan adanya fenomena ini maka perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Beberapa Beberapa studi telah menemukan hubungan antara pendidikan dan pemakaian kontrasepsi. Secara nasional, angka unmet need pada tahun 2022 berdasarkan hasil perhitungan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 sebesar 14,7 persen. Capaian ini mengindikasikan hal yang positif karena angka unmet need mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 18 persen.Target unmet need pada tahun 2025 adalah 11,65 dan realiasi 11,10 .



## 2. Arah Kebijakan DP3AP2KB

Mempertimbangkan isu strategis diatas, maka arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB untuk mendukung mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani salah satunya adalah “ Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif. Dan tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,perindungan anak pengendalian penduduk dan KB yaitu : **Meningkatkan Kesetaraan Gender,Perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengendalikan pertumbuhan**

**penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi, melalui :**

1. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan kualitas hidup perempuan perempuan dan pemenuhan Hak Anak akan difokuskan pada.
  - a. Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan cara kolaborasi antar lembaga dan mitra stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah;
  - b. Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi termasuk perempuan penyintas korban kekerasan;
  - c. Peningkatan literasi politik perempuan;
  - d. Penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
  - e. Peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus
2. Peningkatan perlindungan Perempuan dan anak difokuskan pada:
  - a. Penguatan layanan penanganan kekerasan bagi Perempuan dan anak secara terpadu, termasuk di ranah daring dan pemanfaatan teknologi dan informasi;
  - b. Optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai pihak;
  - c. Optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif;
  - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan layanan UPT PPA dengan Mitra Stake Holder pelayanan;
  - e. Penciptaan lingkungan ramah anak.
3. Pengendalian Penduduk dan KB difokuskan pada:
  - a. Peningkatan Penggunaan Alat Kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif menurunkan angka unmet need;
  - b. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, sekolah lansia, untuk peningkatan kualitas keluarga;
  - c. Peningkatan kualitas kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKL,BKR,PIK-R,UPPKA) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga;
  - d. Peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus;

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2025

#### **2.1.1. Visi**

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI ( Berkualitas,Ekonomi Maju, Religius, Aman, Harmonis,Mandiri dan Inovatif) ”

#### **2.1.2. Misi**

**Untuk Mencapai Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 3 (Tiga) Misi, yaitu**

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tentram,tertib,mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan;

Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk secara implisit Menyusun Rencana Strategis dalam menjalankan tiap misi sesuai Program dan Kegiatan Yang tertuang dala Rencana Strategus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

#### **2.1.3. Tujuan**

Perumusan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, amanat peraturan perundang-undangan terkait, agenda pembangunan nasional, dan arahan Bupati untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB. Secara umum tujuan OPD untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yaitu:

“ Meningkatkan kesetaraan gender,perlindungan perempuan dan anak,mengedalikan penduduk dan peningkatan pelayanan KB serta kesehatan reproduksi menuju keluarga berkualitas “



Gambar 2.1 Skema Perumusan Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

#### 2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, ditetapkan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020 – 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 1.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
- 1.4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- 1.5. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

- 1.6. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)
  - 1.7. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
  - 1.8. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
  - 1.9. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)
  - 1.10. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)
2. Terwujudnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
- 2.2. Opini BPK

<b>VISI</b>	<b>Kementerian PPPA yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.</b>	
<b>MISI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;</li> <li>2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;</li> <li>3. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;</li> <li>4. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;</li> <li>5. Mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu;</li> <li>6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGPPA.</li> </ol>	
<b>TUJUAN</b>	1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.	2. Terwujudnya Kementerian PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)</li> <li>2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li> <li>3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</li> <li>4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)</li> <li>5. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)</li> <li>6. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)</li> <li>7. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif</li> <li>8. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)</li> <li>2. Opini BPK</li> </ol>
<b>SASARAN PROGRAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan</li> <li>2. Meningkatnya pemenuhan hak anak</li> <li>3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak</li> <li>4. Meningkatnya Perlindungan Hak Perempuan dari berbagai Tindak Kekerasan dan TPPO</li> <li>5. Meningkatnya Perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</li> </ol>	1. Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Gambar 2.2 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Dan Sasaran Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, mengedalikan penduduk dan peningkatan pelayanan KB serta kesehatan reproduksi menuju keluarga berkualitas	1) Meningkatkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	<b>Indikator Kinerja SS.1 :</b>								
		a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,51	86,90	87	87,25	87,50	87,75	
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,39	73,5	74	74,25	74,5	75	
		c. Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	
		d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66.26	66.34	68,10	69.87	71.66	73.49	
	2) Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	<b>Indikator Kinerja SS.2 :</b>								
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	6	33	32	31	39	29	UPT - PPA
	3) Meningkatnya Kualitas Keluarga	<b>Indikator Kinerja SS.3 :</b>								
		Angka Perceraian	Angka	0,75	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	
	4) Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	<b>Indikator Kinerja SS.4 :</b>								
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	62,97	63,47	63,97	64,47	64,97	65,47	
	5) Terkendalinya Pertambahan Penduduk	<b>Indikator Kinerja SS.5 :</b>								
Angka Kelahiran Total/ TFR (Anak Per Wanita 15-49 Tahun)		Angka	2,39	2,33	2,31	2,28	2,26	2,24		
6) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	<b>Indikator Kinerja SS.6 ;</b>									
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Angka	62,70	62,80	62,90	63,00	63,10	63,20		

reproduksi (KB/KR)								
7) Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	<b>Indikator Kinerja SS.7;</b>							
	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	64,56	62,70	62,80	62,90	63,00	63,10
8) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	<b>Indikator Kinerja SS.8;</b>							
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	83,81	84,81	85,00	86,20	87,50	87,50

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025

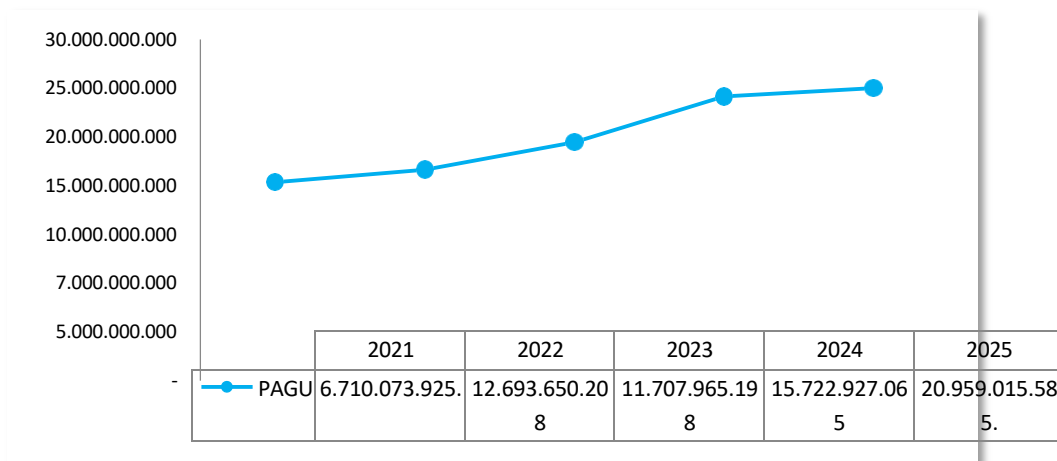
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
<b>Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat</b>			
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,90
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,39
3.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,54
<b>Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan</b>			
4.	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	Indeks	63,47
<b>Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Keluarga</b>			
5.	Angka Perceraian	Angka	2,1
<b>Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak</b>			
6.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,47
<b>Sasaran Strategis 5: Terkendalinya Pertambahan Penduduk</b>			
7.	Angka total kelahiran /( Total fertility rate/TFR) Per WUS 15-49 Tahun	Angka	2,35
	Age spesifik Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Angka	28,00
<b>Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Pelayanan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</b>			
9.	Angka pemakaian kontrasepsi (MCPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Persen	65,32
	Cakupan PUS yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Anggka	11,65
<b>Sasaran Strategis 2: Meningkatnya akuntabel kinerja dan pelayanan publik perangkat Daerah</b>			
12.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,81

Untuk mewujudkan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.959.015.585,- dengan sumber dana berasal dari APBD dan DAK

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025 Per Program

No.	Program	Pagu APBD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Perse n (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6,712,495,985.00	5,922,511,591.00	88,23
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	836,571,200.00	775,287,276.00	92,67
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	5,226,935,600.00	5,132,687,830.00	98.20
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	147,244,000.00	122,873,400.00	83.45
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	357,034,800.00	309,003,362.00	86.55
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	137,029,000.00	108,209,206.00	78.97
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	779,099,800.00	691,017,000.00	88.69
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4,891,708,000.00	4,426,591,944.00	90.49
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1,870,897,200.00	1,756,319,200.00	93.88
	<b>Total</b>	<b>20,959,015,585.00</b>	<b>19,244,500,809.00</b>	<b>91.82</b>

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB memperoleh kenaikan pagu alokasi anggaran pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2020-2023. Secara rinci, perkembangan pagu alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2020-2025 terlihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Perkembangan Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 2021 - 2025

### 2.3. PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

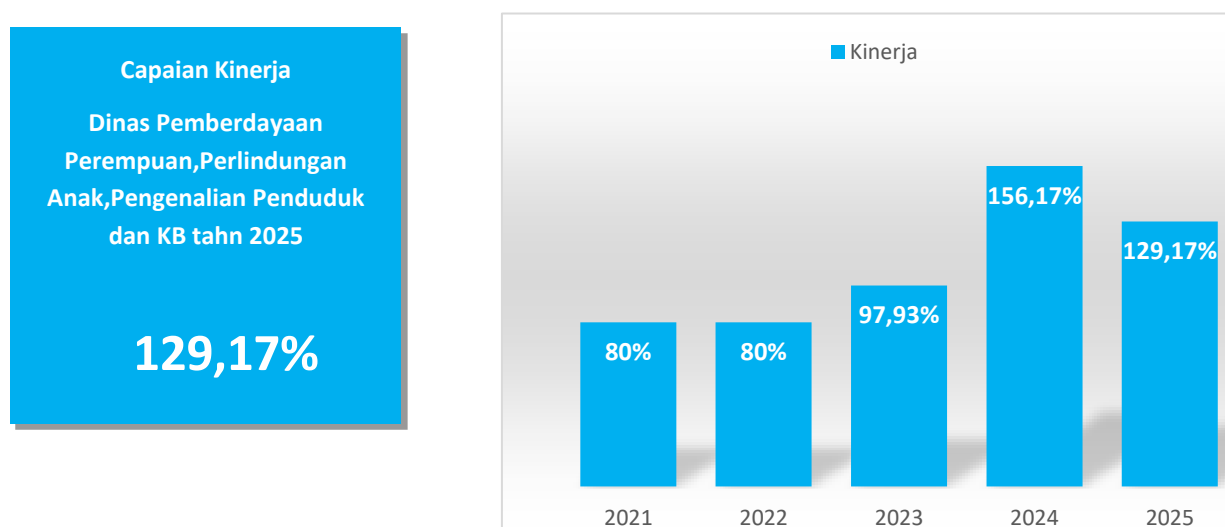
Pengukuran dan pengelolaan data kinerja dilakukan secara internal dan eksternal. Pemantauan kinerja dan anggaran secara internal dilakukan pada rapat pimpinan yang dilakukan setiap bulan melalui dialog kinerja organisasi, pengukuran kinerja melalui Laporan evaluasi kinerja individu .

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB adalah perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan. Akuntabilitas kinerja memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang telah diperjanjikan secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

#### 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun 2025 adalah 129,17% dengan predikat kinerja “Baik”, angka ini merupakan rata-rata dari capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas P3AP2KB tahun 2025. Capaian kinerja sasaran strategis merupakan rata-rata dari capaian indikator sasaran strategis.



Gambar 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021-2025

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, terdapat tren penurunan dari tahun 2024 ke Tahun 2025. Adanya penurunan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 27 poin, hal disebabkan adanya penyesuaian dalam penetapan target Renstra.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB memiliki 11 indikator sasaran strategis. Dari 11 indikator tersebut, sebanyak 8 indikator dengan predikat

“Istimewa” dengan nilai >100

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,90	86,8	99,88 ●
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,39	63,43	86,42 ●
3	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,54	0,58	93,10 ●
4	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	Indeks	63,47	28,53	115,67 ●
5	Angka Perceraian	Angka	2,1	1,49	141 ●
6	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	63,47	69,01	108,72 ●
7	Angka total kelahiran / ( Total fertility rate/TFR) Per WUS 15-49 Tahun	Angka	2,35	2,31	101,70 ●
8	Age spesifik Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Angka	65	23,7	274,20 ●
9	Cakupan PUS yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Angka	11,65	5,6	208,04 ●
10	Indeks Pembangua Keluarga (I Bangga)	Indeks	66,68	66	98,9 ●
11	Angka pemakaian kontrasepsi (MCPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Persen	69,79	65	100,75 ●
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>129,17 ●</b>

Keterangan: Predikat

Kinerja ● kinerja > 100%

(istimewa) ● 80% < kinerja

≤ 100% (Baik)

● 60% < kinerja ≤ 80% (Butuh

Perbaikan) ● 20% < kinerja ≤ 60%

(Kurang)

● 0% ≤ kinerja ≤ 20% (Sangat Kurang)

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Sebagai Pembanding capaian indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah target dan capaian indikator kinerja pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta Target dan realisasi prevalensi stunting propinsi jambi. Pada tabel dibawah ini adalah merupakan target dan realisasi capaian kinerja program pada Kemen PPPA dan BKKBN RI.

**Tabel 3.1  
Target Kinerja Sasaran Kemen PPPA  
Tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>1. Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak</b>	1) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	<b>Indikator Kinerja SS.1 :</b>				
		a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,76	91,85	<b>100,1%</b>
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	79,16	76,9	<b>97,15</b>
		c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	53,5	56,42	<b>105,46</b>
		d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,9	63,9	<b>99,89</b>
		e. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	%	7,8	6,6	<b>118,18</b>

	f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	%	lk ;25 Pr ;36	Lkm; 49,83 Pr;51,78	<b>59,85</b>
	g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	% (Anak)	95,02	100,02	<b>100,02</b>
	h. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA);	% (anak)	<b>20,59</b>	<b>17,65</b>	<b>85,72</b>

**Tabel 3.2**  
**Tren Angka Prevalensi Stunting Propinsi Jambi**  
**Tahun 2013-2025**

NO	KABUPATEN/KOTA	RISKESDAS 2013	RISKESDAS 2018	SSGBI 2019	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	SSGI 2024	SELISIH 2023-2024
1	Kerinci	55,3	42,36	33,85	26,7	24,2	8,7	<b>16,4</b>	-7,7
2	Merangin	37,5	34,97	15,38	19,7	14,5	14,9	9,6	<b>5,3</b>
3	Sarolangun	40,8	18,83	19,06	21,4	16,8	4,8	6,6	-1,8
4	Batanghari	39,5	32,75	27,32	24,5	26,3	10,1	<b>18,4</b>	-8,3
5	Muaro Jambi	50	20,68	13,51	27,2	18,6	12	<b>18,8</b>	-6,8
6	Tanjung Jabung Timur	48,5	40,89	20,05	25,6	22,5	23,7	23,9	-0,2
7	Tanjung Jabung Barat	29,6	43,99	21,81	19,8	9,9	14,1	7	<b>7,1</b>
8	Tebo	41,4	33,02	30,13	26,2	25	22,7	24,2	-1,5
9	Bungo	34,5	20,74	27,57	22,9	15,4	13,7	<b>20,4</b>	-6,7
10	Kota Jambi	24,6	26,22	18,62	17,4	14	13,5	10,3	<b>3,2</b>
11	Kota Sungai Penuh	36,9	35,75	25,66	25	26	4,1	8	-3,9
<b>Provinsi Jambi</b>		<b>37,9</b>	<b>30,12</b>	<b>21,03</b>	<b>22,4</b>	<b>18</b>	<b>13,5</b>	<b>17,1</b>	<b>-3,6</b>
<b>Rata-Rata Prevalensi Prov. Jambi 2025</b>								<b>14,9</b>	

Dalam melaksanakan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.3.

**Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%;	<b>Sangat Baik</b>
2.	85 - 100%;	<b>Baik</b>

3.	65 – 84,99%;	<b>Cukup</b>
4.	50 – 64,99%;	<b>Kurang</b>
5.	Kurang dari 50%	<b>Sangat Kurang</b>

Untuk mengukur keberhasilan atas kinerja Dinas Perempuan dan Anak dapat dilihat diantaranya melalui realisasi indikator-indikator yang ada pada sasaran strategisnya, antara lain IPG, IDG, Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Angka Perceraian, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), *Total Fertility Rate* (TFR), ASFR, Indeks Pembangunan Keluarga, MCPR, *Unmetneed*, Dan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk. Berikut adalah uraian capaian terkait urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025, setidaknya terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2025.

1. Penjabaran capaian kinerja sasaran strategis 1 pada Sasaran Kinerja 1 ; Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (IPG dan IDG) adalah sebagai berikut;

**Tabel 3.2**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis 1**  
**dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja				Rata-rata realisasi kinerja pertahun	Rata-rata capaian kinerja
			2021	2022	2023	2025	2021	2022	2023	2025	2021	2022	2023	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	$16=(8+9+10+11)/4$	$17=(12+13+14+15)/4$
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87	87,5	88,5	89	98	85,79	86,17	86,51	113%	98%	97,37%	97,20%	89	101%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,5	69	69,5	70	100	73,20	73,46	73,39	146%	106,1%	106%	105%	80	116%

Dalam mencapai sasaran kinerja meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tahun 2025 target IPG sebesar 89 sedangkan target IDG sebesar 70. Realisasi IPG sebesar 86,51 sehingga capaian kinerja sebesar 97,20%. Sementara untuk realisasi IDG pada Tahun 2025 sebesar 73,39 dengan capaian kinerja sebesar 105%. Baik IPG maupun IDG targetnya tercapai bahkan di atas target. Data IPG diperoleh dari Tabel, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DP3AP2KB tidak melakukan kajian dan perhitungan sendiri, Untuk tahun 2025 data IPG dan IDG perhitungannya dilakukan pada Tahun 2025, maka data tahun 2025 masih menggunakan data yang sama di tahun 2023. IPG adalah merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan atau menggambarkan

kesenjangan pembangunan manusia antara laki- laki dan perempuan. Sedangkan IDG adalah merupakan alat ukur untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Adapun capaian terhadap IPG dan IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penghitungan oleh BPS, dengan komponen IPG antara lain:

(1) Angka Harapan Hidup, (2) Angka Harapan Lama Sekolah, (3) Rata-rata Lama Sekolah dan (4) Pengeluaran Per-kapita. Dan Komponen IDG antara lain (1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen, (2) Perempuan sebagai menejer, profesional, administrasi dan tekhnis serta sumbangan perempuan dalam pendapatan. IPG adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dan IPM digunakan untuk mengukur pembangunan manusia berbasis gender di tingkat nasional.

Untuk sasaran IPG merupakan indikator yang mengukur kondisi pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dianalisis hingga tingkat Kabupaten/Kota.

2. Penjabaran capaian kinerja sasaran strategis 2 pada Sasaran Kinerja 2 ; Meningkatnya Perlindungan Perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut;

**Tabel 3.4**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis 2**  
**dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
			2021	2022	2023	2025	2021	2022	2023	2025	2021	2022	2023	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	$12=(8/4)\times 100$	$13=(9/5)\times 100$	$14=(10/6)\times 100$	$15=(11/7)\times 100$
2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	15	12	9	6	0	9,06	23	33,3	0	76%	256%	555%

Pada indikator rasio kasus kekerasan perempuan terus mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2022 (9,06) 2023 (23 kasus) 2025 menjadi 33,3 kasus dengan rasio capaian meningkat sampai dengan 479% pada tahun 2025, Hal ini menunjukkan masyarakat khususnya perempuan dan anak sudah memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Kasus Kekerasan yang terjadi beragam mulai dari kekerasan seksual, Kasus KDRT dan Kekerasan Fisik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui UPT PPA Tanjung Jabung Barat terus memberikan edukasi tentang *self awarness* mulai mendapat edukasi tentang Perlindungan Perempuan baik edukasi ke Masyarakat Umum maupun Ke sekolah untuk mengurangi angka kekerasan . Adanya Aplikasi SINPAN sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena masyarakat dengan mudah dapat mengakses dan melaporkan secara online media media maupun langsung mendatangi UPT PPA Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaporkan Kekerasan yang mereka alami.

Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang berimbas pada meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak. Pada saat ini, kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak juga meningkat.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak. Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar Rp. 468.231.200 terealisasi sebesar Rp. 354.358.451 (75,68%) yang artinya terjadi efisiensi sebesar Rp. 113.872.749 (24,31%). Hal ini terjadi karena pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dari APBN tidak terserap optimal. Penyebabnya adalah kebutuhan anggaran menyesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan korban yang melapor serta sudah adanya Kerjasama dengan rumah sakit, sehingga biaya visum dan pendukungnya tidak dipungut biaya.

**Tabel 3.5**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN/INDIKATOR UTAMA**  
**PERANGKAT P3AP2KB KABUPATEN TANJAB BARAT**  
**TAHUN 2025**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Rasio Capaian
Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	86,90	86,8	99,88%
	2. Indeks Pembangunan Gender (IDG)	73,39	63,43	86,42%
	3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,54	0,58	93,10%
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan	3. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	33	28,53	115,67%
Meningkatnya Kualitas Keluarga	4. Angka Perceraian	2,1	1,49	141%
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	5. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,47	69,01	108,72%
Terkendalnya Pertambahan Penduduk	6. Angka Total kelahiran / (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS 15-49 tahun	2,35	2,31	101,70%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)	7. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	65	23,7	274,20%
	Cakupan PUS yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	11,65	5,6	208,04%
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	8. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	66,68	66	98,9%
	9. Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan Menikah usia 15-49 tahun	69,70	65	93,25%

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas keluarga capaian indikatornya yaitu angka perceraian target Tahun 2025 sebesar 0,75. Tahun 2025 angka cerai sebanyak 688 kasus, dengan jumlah penduduk pada tahun 2025 sebanyak 331.058 jiwa. Jadi realisasi pada 2025 adalah 2,1 sehingga rasio capaian tahun 2025 sebesar 35,71%., artinya kinerja belum mencapai target karena belum mampu menekan angka perceraian di Tanjung Jabung Barat, Banyak faktor Penyebab tingginya Angka perceraian salah satunya adalah faktor ekonomi. DP3AP2KB sesuai fungsinya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi tentang Pernikahan.

Target angka perceraian tahun 2023 sebesar 1,25. Tahun 2023 angka cerai sebanyak 1.047 kasus, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 326.530 jiwa. Jadi realisasi pada 2023 adalah 3,2 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 321%.

- Target angka perceraian tahun 2022 sebesar 1. Tahun 2022 angka cerai sebanyak 522 kasus, dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 326.606 jiwa. Jadi realisasi pada 2022 adalah 1,6 sehingga capaian tahun 2022 sebesar 127%.
- Angka TFR (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15-49 Tahun.TFR ditergetkan pada tahun 2025 sebesar 2.4 kelahiran per wanita usia subur dan menjadi 2.39 pada tahun 2025 (*Sumber data BPS/SP 2020*). Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini terkait dengan pengendalian jumlah penduduk khususnya pengendalian kelahiran menuju target ideal 2,1 anak per wanita yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2026. Adapun upaya penurunan TFR dapat dilakukan dengan:

- (a) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), perempuan 21 tahun dan laki laki 25 tahun (Program GenRe), semakin tinggi usia kawin pertama, akan menurunkan tingkat fertilitas/kelahiran.
- (b) Tingkat pendidikan perempuan, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan berpengaruh signifikan dengan tingkat fertilitas/kelahiran.
- (c) Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja dan pendanaan usaha mikro kecil menengah yang mendukung perekonomian masyarakat. Meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada turunnya angka fertilitas.
- (d) Mengintensifkan wajib belajar 12 tahun, penurunan biaya pendidikan serta subsidi pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dalam upaya menunda pernikahan terutama bagi remaja.
- (e) Strategi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB MKJP seperti IUD, Implant, MOW dan MOP.
- (f) Meningkatkan kelompok kegiatan (Poktan) secara kualitas dan kuantitas, diantaranya kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK-R , serta UPPKA.

Permasalahan : masih adanya usia perkawinan anak/usia muda. Penghambat :

- (g) pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah.
  - (h) masih berpegang teguh dalam budaya atau stigma banyak anak, banyak rejeki.
- Pendorong :

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pendewasaan usia perkawinan.

- (i) Peningkatan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan.
- (j) Pengembangan sektor ekonomi seperti UPPKA.

Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19). ASFR 15-19 tahun menunjukkan indikator kelahiran / fertilitas pada perempuan kelompok usia 15-19 tahun. Hasil SP2020 menunjukkan bahwa capaian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan angka 50,80 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15 – 19 tahun, sementara target 67 kelahiran per 1000 penduduk perempuan usia 15 – 19 tahun. Data tersebut menunjukkan. hasil capaian lebih tinggi dari target yang diharapkan, sehingga dapat dikatakan indikator ini melebihi dari target dengan persentase realisasi sebesar 133,8 persen. Hal ini karena ASFR 15-19 tahun berkaitan erat dengan perkawinan anak, kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan perempuan, budaya dan juga pengetahuan tentang kesehatan reproduksi usia dini. ASFR 15-19 tahun merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja program Bangga Kencana diseluruh tingkat wilayah. Kebijakan untuk menurunkan ASFR 15-19 tahun harus melibatkan berbagai sektor terkait agar secara bersama-sama peduli untuk menurunkan angka ASFR 15-19 tahun. Upaya penurunan ASFR 15-19 tahun dapat dilakukan dengan pendewasaan usia perkawinan melalui peningkatan usia lama sekolah anak perempuan/ meningkatkan program wajib belajar 12 tahun/SMA, partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan reproduksi remaja. DP3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya melakukan hal tersebut melalui berbagai strategi seperti Generasi Berencana (GenRe), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Ketahanan Remaja, UU pernikahan no 19 tahun 2019. Permasalahan tingginya keluarga pra sejahtera 7411 KK dan Keluarga sejahtera I 32974 KK. Penghambatnya terjadinya putus sekolah akibat faktor ekonomi dan kehamilan yang tidak diinginkan/pergaulan bebas pada remaja.

Untuk Sasaran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas keluarga. iBangga menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Dengan demikian i-Bangga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan / program / kegiatan di wilayahnya. Peningkatan kualitas keluarga dapat menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), diketahui bahwa target i-Bangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah 62,56% dengan realisasi capaian 62,61% (*Sumber data: Pemutakhiran PK -22, Pemutakhiran PK-23, Pemutakhiran PK-24*). Nilai i- Bangga menurut dimensi dibagi dalam 3 (tiga) indikator yaitu dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan. Capaian ini mengindikasikan bahwa peran, fungsi dan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga masih belum maksimal. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai sektor pembangunan terkait, meningkatkan komitmen dan sinergitas antar Instansi/dinas terkait lainnya serta pemangku kepentingan untuk membenahi seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga. Berbagai upaya dapat dilakukan

dengan cara pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas gizi, sanitasi, lingkungan, pendidikan, serta perlu digencarkannya sosialisasi i-Bangga hingga keseluruhan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini bertujuan meningkatkan pembangunan keluarga secara menyeluruh sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Permasalahan masih ditemukan masalah social seperti kemiskinan. Penghambat menurunnya hasil komoditi perkebunan seperti pinang, dan banyaknya kasus usia perkawinan dini.

Pada indikator Sasaran Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun Prevalensi Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalence Rate* selanjutnya disebut mCPR, adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Metode kontrasepsi modern yang dimaksud meliputi Metode Operasi Wanita (MOW) atau steril wanita atau tubektomi, Metode Operasi Pria (MOP) atau steril pria atau vasektomi, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau spiral atau *Intra-Uterine Device* (IUD), susuk (*implant*), suntik, pil, kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL). Target mCPR di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah 68,3 %, sedangkan realisasi capaian sebesar 69,9%. Dilihat dari data tersebut diatas, untuk target mCPR sudah tercapai dan melebihi dari target. Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut, diantaranya : Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memilih metode kontrasepsi yang efektif dan akurat; (a) Meningkatkan kompetensi dari tenaga medis (dokter dan bidan); (b) Tempat konseling / akses yang mudah dengan memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB(Obgyn Bed, IUD KIT, Implan KIT); (c) Menggiatkan program safari KB; (d) Memperkuat sistim logistik (alat dan obat kontrasepsi/Alokon) diberbagai tingkatan terutama memastikan distribusi dinamis di kabupaten/kota; (e) Serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, media, dunia bisnis, akademisi, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah terhadap pemberian pelayanan kontrasepsi. Permasalahan kurangnya tenaga lini lapangan/PLKB. Penghambatnya kurangnya pengetahuan tentang program KB dan masih kurangnya kuelitas dan kuantitas pelayanan KB serta Drop Out akseptor KB (putus pakai akseptor KB).

Penjelasan Indikator Sasaran Cakupan pasangan usia subur (pus) yang ingin ber-kb tidak terpenuhi (unmeet need). Unmet Need KB / kebutuhan KB yang tidak terpenuhi adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) 15- 49 tahun yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan menggunakan kontrasepsi apapun. Target unmet need pada tahun 2025 adalah 18,05% dan capaian 8,2% pada tahun 2025. strategi yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut, antara lain : (a) Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memilih metode kontrasepsi yang efektif dan akurat; (b) Tindaklanjut kelangsungan kesertaan ber- KB/mencegah drop out (putus pakai) ber-KB; (c) Meningkatkan kompetensi dari tenaga medis (dokter dan bidan); (d) Meningkatkan layanan (sarana dan prasarana) program KB dan kesehatan reproduksi; (e) Menyediakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) sesuai dengan keinginan akseptor / pilihan metode kontrasepsi; (f) Meningkatkan peran serta suami dalam ber-KB. Permasalahan belum optimalnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang(MKJP), ketersediaan alokon yang sesuai dengan keinginan akseptor KB. Penghambat rasa takut pada efek samping dari ber-KB seperti rasa nyeri, kegemukan. Masih rendahnya partisipasi suami yang ber-KB. PUS merasa sudah tua.

Kurangnya tenaga medis yang berkompeten dalam pemasangan KB MKJP. Pendorongnya adanya program metode operasi pria (MOP)

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 20.959.015.585,- sumberdana dari APBD Murni Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan DAK . Anggaran tersebut terpilah dalam Anggaran untuk Belanja Operasi Rp. 19.244.500.809 dan Anggaran untuk Belanja Modal Rp. 1.400.445.000. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 adalah 92,82% terjadi efisiensi Rp. 1.129.447.451,03,- (7,18%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025**

No.	PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN	TARGET BELANJA	Realisasi per 31 Des 2025	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT</b>	<b>20,959,015,585.00</b>	<b>19,244,500,809.00</b>	<b>91.82</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>6,712,495,985.00</b>	<b>5,922,511,591.00</b>	<b>88.23</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	283,745,000	271,025,750	95.52
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	459,491,400	443,059,115	96.42
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,624,800	48,224,800	91.64
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,420,927,685	3,809,734,255	86.17
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339,056,500	306,908,793	90.52
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161,705,000	78,555,325	48.58

7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	467,876,000	446,270,300	95.38
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111,599,600	104,315,678	93.47
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	415,470,000	414,417,575	99.75
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>836,571,200.00</b>	<b>775,287,276.00</b>	<b>92.67</b>
11	Pelembagaan Pengarusutan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	90,607,000	82,573,500	91.13
12	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	695,964,200	649,893,776	93.38
13	Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	42,820,000	85.64
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>5,226,935,600.00</b>	<b>5,132,687,830.00</b>	<b>98.20</b>
14	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten	107,624,000	80,168,000	74.49
15	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten	5,079,312,000	5,023,170,230	98.89
16	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39,999,600	29,349,600	73.37
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>147,244,000.00</b>	<b>122,873,400.00</b>	<b>83.45</b>
17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	69,600,000	51,970,000	74.67
18	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak	77,644,000	70,903,400	91.32

<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>357,034,800.00</b>	<b>309,003,362.00</b>	<b>86.55</b>
19	Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonperintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	257,035,000	240,613,676	93.61
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	99,999,800	68,389,686	68.39
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>137,029,000.00</b>	<b>108,209,206.00</b>	<b>78.97</b>
21	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	66,129,000	40,652,500	61.47
22	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	20,000,000	100.00
23	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	50,900,000	47,556,706	93.43
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>779,099,800.00</b>	<b>691,017,000.00</b>	<b>88.69</b>
24	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	64,876,000	61,601,000	94.95
25	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	413,423,800	391,616,000	94.73
26	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	238,800,000	175,800,000	73.62
27	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	62,000,000	62,000,000	100.00
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>4,891,708,000.00</b>	<b>4,426,591,944.00</b>	<b>90.49</b>
28	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1,115,373,000	1,104,824,100	99.05
29	Pengendalian dan Pendistribusian	80,915,000	54,202,000	66.99

	Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
30	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	24,040,000	22,574,000	93.90
31	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,746,900,000	1,561,156,472	89.37
32	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	630,880,000	588,755,372	93.32
33	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	221,600,000	139,230,000	62.83
34	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB	1,072,000,000	955,850,000	89.17
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>1,870,897,200.00</b>	<b>1,756,319,200.00</b>	<b>93.88</b>
35	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	263,077,200	172,929,850	65.73
36	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	129,420,000	104,989,350	81.12
37	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Membangun Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	1,478,400,000	1,478,400,000	100.00
<b>JUMLAH</b>		<b>20,959,015,585.00</b>	<b>19,244,500,809.00</b>	<b>91.82</b>

Jika dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 telah direncanakan pada Renstra Dinas P3AP2KB Periode 2021 - 2026, yang kemudian

dituangkan dalam Renja dan disampaikan ke TAPD melalui Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan kemampuan anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan anggaran program dan kegiatan yang prioritas adalah sesuai dengan KUA-PPAS yang ditetapkan oleh TAPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rasio anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 cukup signifikan, untuk pencapaian kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh dukungan ketersediaan pendanaan ataupun anggaran pelayanan dalam urusan wajib pemerintahan yaitu urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama lima tahun cukup baik, hanya saja ada beberapa kegiatan yang ada pada dokumen renstra tidak teranggarkan secara konsisten sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra), bahkan tidak teranggarkan karena anggaran daerah tidak memadai, kemudian anggaran pada program yang pendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, jika diperhatikan indikator kerjanya anggaran APBD sangatlah minim dibandingkan dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang anggaran kegiatannya didukung juga dengan dana APBN melalui DAK Fisik dan Non Fisik BOKB, sedangkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baru mendapat bantuan DAK Non Fisik Kemneterian PPPA pada tahun 2025 anggaran dipergunakan untuk operasional layanan di UPT PPA Kab.Tanjung Jabung Barat.

Adapun program yang dilaksanakan dan rasio realisasi anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, rasio realisasi anggaran tahun 2025 85%, sementara Tahun 2023 sebesar 97% , terdapat penurunan sebesar 12% terhadap realisasi capaian anggaran
2. Program Perlindungan Perempuan rasio realisasi capaian anggaran tahun 2025 sebesar 78% , terdapat penurunan rasio capain realisasi anggaran dibanding tahun 2023 sebesar 98% (20%), hal ini dapat dijelaskan bahwa sumber dana anggaran untuk program perlindungan perempuan berasal dari dana DAK BOPPA, dalam pelaksanaan dilapangan terjadi ketidaksesuain sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Program Peningkatan kualitas keluarga, rasio realisasi tahun 2023 sebesar 94% dan tahun 2025 sebesar 98%
4. Program Pemenuhan Hak anak, rasio realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 93% dan tahun 2025 sebesar 94%.
5. Program Perlindungan Khusus anak, rasio realisasi tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2025 sebesar 81%.
6. Program Pengendalian Penduduk, rasio realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2025 sebesar 100%.
7. Program Keluarga Berencana, rasio realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 0, tahun 2022 sebesar 96%, tahun 2023 sebesar 0% dan tahun 2025 sebesar 70%.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun keempat dari rencanastrategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, hal itu dapat diukur dari seluruh target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dapat direalisasikan sesuai harapan dengan kategori **(Baik)**. Hal tersebut didukung data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) rata-rata capaiannya sebesar (110,25%), dengan rincian sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kesetaraan Gender, didukung 2 indikator kinerja dengan capaian sebesar 97,20% atau kategori **Sangat Baik**;
- b. Meningkatnya Perlindungan perempuan dan anak, didukung 1 indikator sebesar 115'67 % atau kategori **sangat Baik**;
- c. Meningkatnya Kualitas Keluarga, didukung 1 indikator didukung sebesar 141% atau kategori **sangat Baik**;
- d. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penduduk, didukung 1 indikator sebesar 101,70% atau kategori **Sangat Baik**;
- e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, didukung 1 indikator sebesar 75,24 atau kategori **Baik**.
- f. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan dari mitra kerja.

Beberapa inovasi baik instrument pendukung kinerja maupun inovasi program/kegiatan yang dikembangkan oleh Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mampu untuk menyelesaikan beberapa isu strategis yang adaterkait urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana walaupun belum secara optimal. Permasalahan yang masih ada antara lain :

1. Pemberdayaan ekonomi perempuan yang sudah dilakukan, belum ditindaklanjuti secara optimal oleh OPD Kabupaten/Kota karena keterbatasan anggaran;
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan berbasis gender online;
3. Masih rendahnya informasi manfaat ber-KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru menikah;

4. Masih rendahnya Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen GDPK dan mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan;
5. Masih tingginya angka stunting, yang salah satunya karena kurang aktifnya kader tribina;
6. Kurang optimalnya kader UPPKA untuk aktif mendorong kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi produktif.

#### 4.2 Rekomendasi

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pencegahan dan pelayanan dalam rangka menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lintas sektor baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota;
3. Meningkatkan advokasi KIE KB sebagai upaya mendorong kesertaan KB;
4. Mendorong Kabupaten/Kota untuk membuat Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) dalam rangka mewujudkan tercapainya kualitas penduduk yang tinggi;
5. Meningkatkan kualitas Tribina (BKB, BKR, BKL) untuk mendorong pengurangan angka stunting;
6. Meningkatkan kapasitas kader UPPKS sebagai upaya mendorong ekonomi keluarga.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun kedepan.

Kuala Tungkal, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



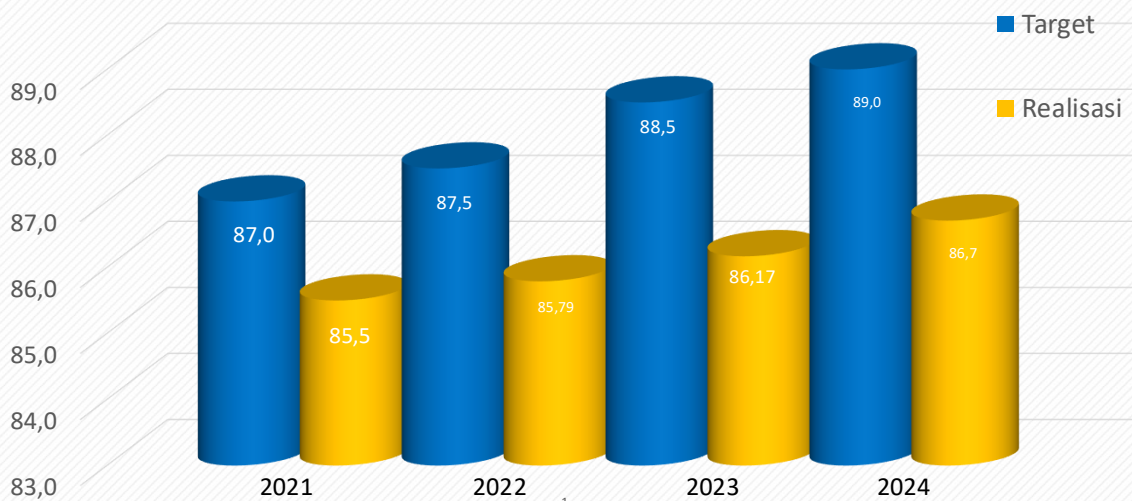
**AINA DEWIANA**  
Pembina  
NIP. 19721030 199203 2 004

## EXECUTIVE SUMMARY

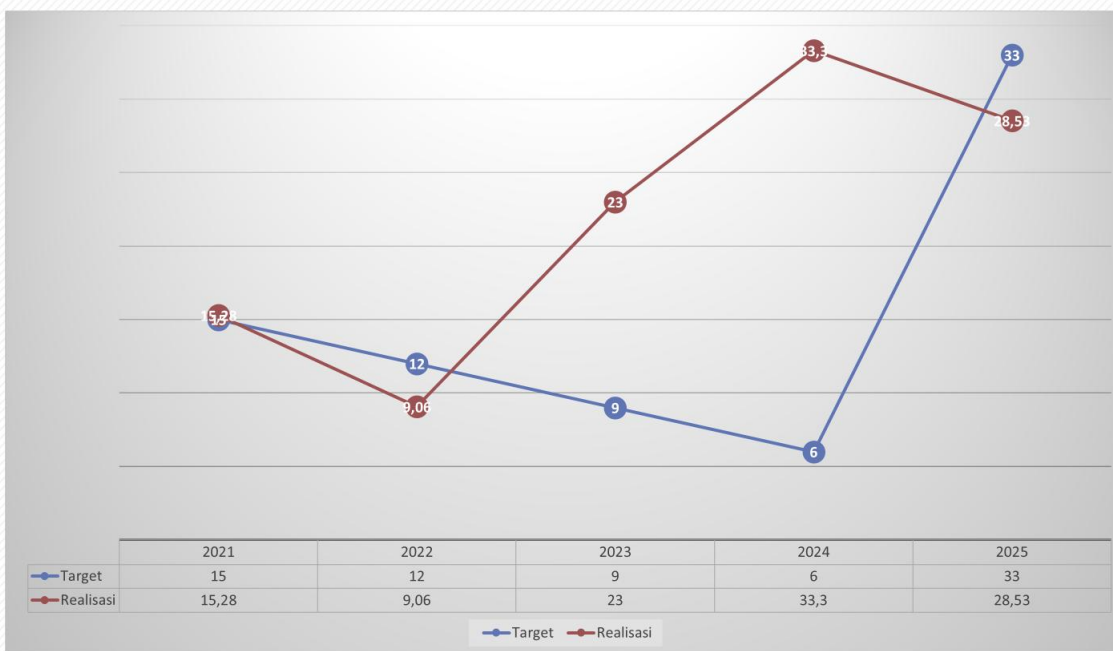
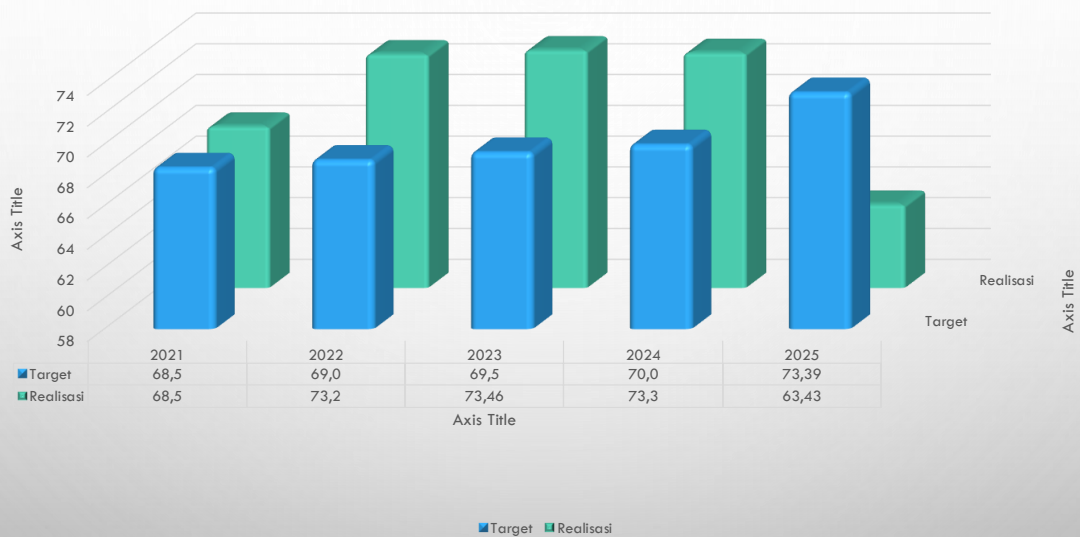
Grafik Rasio Capaian Kinerja 2021-2024



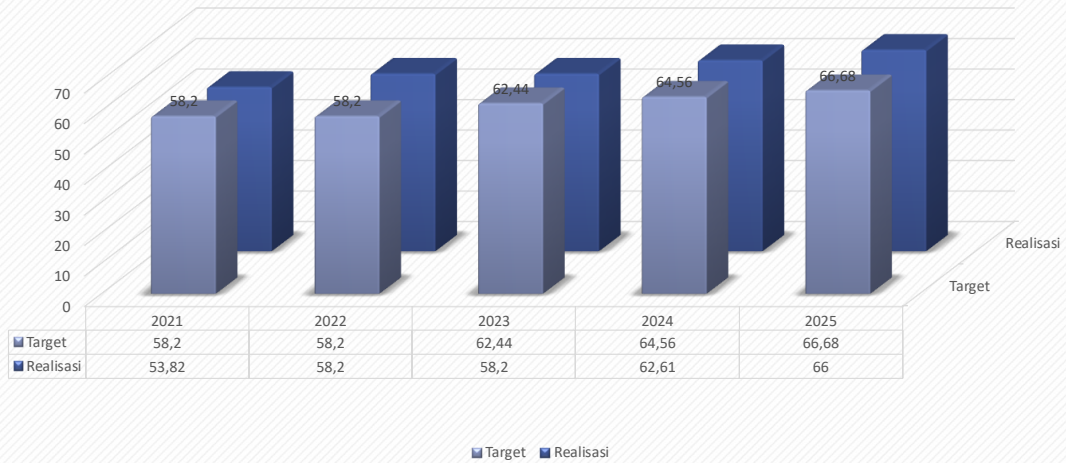
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2024



DATA IDG TAHUN 2021-2024



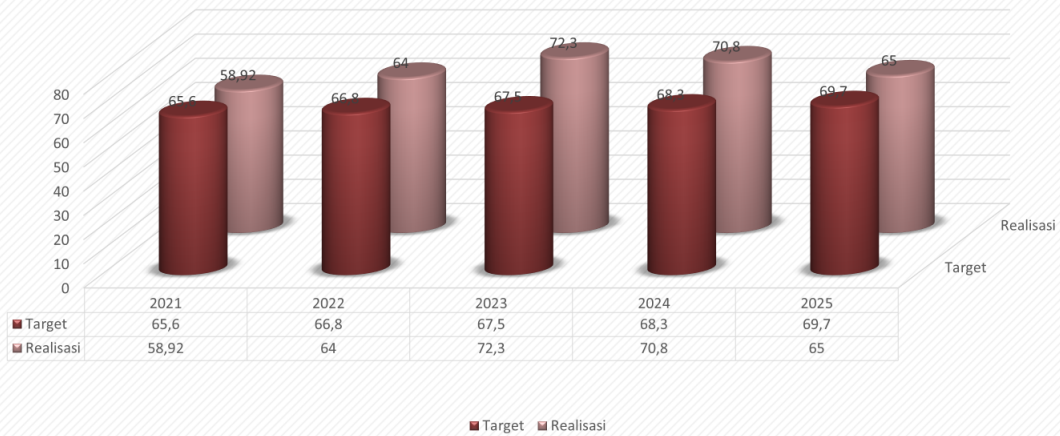
### Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)



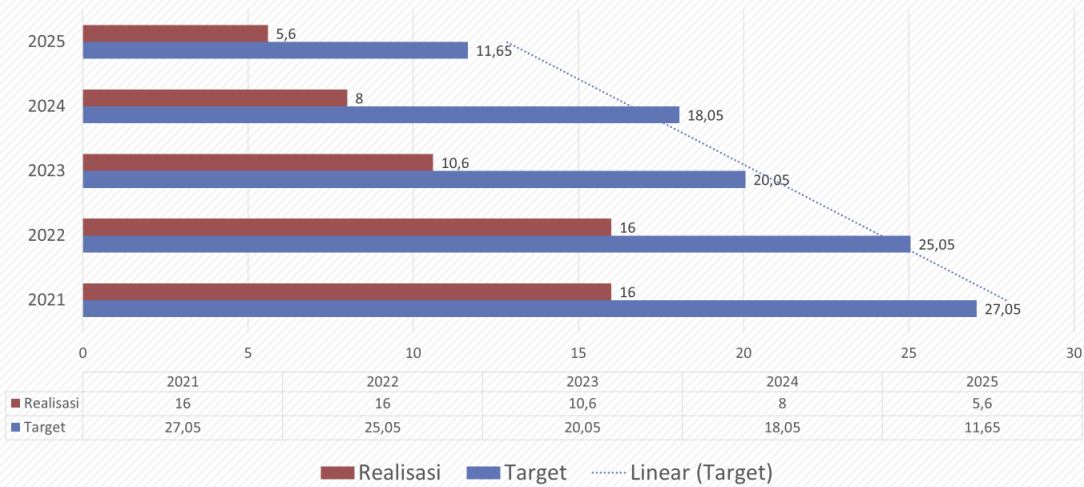
### Angka Total Kelahiran/ (Total Fertilty Rate/TFR) per WUS 15-49 tahun



### Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun



### Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/Unmeet-Need





## Inovasi dan teknologi



Dalam membantu Meningkatkan Layanan Kepada Masyarakat DP3Ap2KB terus berupaya Melakukan Inovasi untuk tetap kompetitif , baik pelayanan secara langsung ataupun dengan Teknologi modern, ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dan pengambilan keputusan berbasis data.

---

## ***APRESIASI DAN PENGHARGAAN 2025***

---